

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI KOTA BANDA ACEH

Gunawan
(Dosen STIEI Banda Aceh)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pengangguran di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif yang merupakan data sekunder, yang dilakukan melalui pengujian teori-teori dan melalui penelitian lapangan, dimana metode deskriptif juga adalah untuk menganalisa data dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti.

Subjek dari penelitian ini adalah Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah data-data mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Kota Banda Aceh, dimana data yang diperoleh selama tahun 2006 - 2015 dan data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data meliputi: *library research* (penelitiankepuustakaan), dan *field research* (penelitianlapangan) dengan metode wawancara yaitu melakukan Tanya jawab sehubungan dengan permasalahan penelitiandan observasi lapangan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkembangan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh dari tahun 2006 sampai 2015 mengalami peningkatan terus menerus dan mencapai puncak pada tahun 2010 yaitu 17,05% dengan peningkatan sebesar 10% di bandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2009 tingkat pengangguran hanya berkisar 7,70%. Pemerintah Daerah melakukankebijakan – kebijakanlainnya seperti Mengembangkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan – kawasan, membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pengangguran, Kota Banda Aceh

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena

pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain perusahaan yang menutup atau mengurangi operasional usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat inventasi, hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Masalah pengangguran akan

menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Di Provinsi Aceh umumnya dan Kota Banda Aceh khususnya, salah satu dampak negatif dari pengangguran adalah dengan makin beragamnya tindakan kriminal, banyaknya jumlah pengemis, pengamen dan sebagainya yang sudah menjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus yang sulit di berantas. Penyakit sosial ini sangat berbahaya dan menghasilkan korban-korban sosial yang tidak bernilai. Menurunnya kualitas sumber daya manusia, tidak di hargainya martabat dan harga diri manusia yang merupakan korban sosial dari penyakit sosial. Oleh karena itu, persoalan pengangguran ini harus secepatnya di pecahkan dan dicari jalan keluarnya.

Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah otonomi dan mempunyai banyak sektor unggulan yang menjadi potensi untuk pemasukan daerah. Sebesar 61 persen dari penduduk usia produktif kota ini mencari kerja di sektor perdagangan. Selain perdagangan, Kota Banda Aceh juga dikenal dengan industrinya yaitu industri makanan, minuman,

kerajinan emas dan perak, dan lain-lain.

Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi Aceh, terus berupaya mengatasi pengangguran, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker Kota Banda Aceh) mencatat angka pengangguran di Banda Aceh mencapai 14.000 orang, dari jumlah tersebut, angka tertinggi adalah pengangguran setelah menyelesaikan pendidikan dan karena kehilangan pekerjaan akibat akibat pemutusan hubungan kerja dan lain-lain.

Terbatasnya lapangan pekerjaan adalah salah satu permasalahan semakin bertambahnya jumlah pengangguran. Apalagi setelah kepergian LSM lokal dan asing dari Aceh justru sangat berpengaruh terhadap hilangnya lahan perkerjaan di Aceh. Meskipun demikian jumlah pengangguran Banda Aceh itu di nilai masih wajar untuk sebuah kota yang terus berkembang. Indikator itu masih wajar terlihat dari jumlah penduduk kota Banda Aceh yang mencapai 232 ribu jiwa.

Berkaitan penanggulangan masalah ini, pemerintah melalui Dinsosnaker, berupaya menekan angka

pertumbuhan pengangguran dengan memperbanyak pelatihan peningkatan kapasitas bagi masyarakat terutama bagi yang belum memiliki pekerjaan, sehingga untuk memperdayakan masyarakat mandiri dan bisa menciptakan lapangan kerja untuk mereka sendiri. Selain itu pemerintah kota juga terus memberdayakan Balai Latihan Tenaga Kerja (BLK) guna membina siswa-siswa yang putus sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka masalah pokok dalam penulisan ini adalah :

- 1) Apa penyebab terjadinya pengangguran di Kota Banda Aceh?
- 2) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- 1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya pengangguran di Kota Banda Aceh
- 2) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengatasi

pengangguran di Kota Banda Aceh.

1.4. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Diduga bahwa rendah nyamutu pendidikan, kurangnya pelatihan kerja, tidak terbukanya kesempatan usaha informal, serta minimnya pembangunan dengan sistem padat karya, merupakan faktor penyebab terjadinya pengangguran di Kota Banda Aceh“.
- 2) Diduga bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah Daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan latihan kerja, mendorong terbukanya kesempatan usaha informal, serta meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya, dimana dapat mengatasi pengangguran di Kota Banda Aceh”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan

pekerjaan yang layak.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

Selanjutnya juga menurut (Sukirno, 2005 : 46) Pengangguran biasanya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu :

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dengan meninggalkan pekerjaan awalnya,
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktural dalam perekonomian,
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

2.1.1. Jenis-jenis Pengangguran

Menurut (Arsyad, 2004 : 16)

Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

- a. Pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
- b. Pengangguran setengah menganggur (*under unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
- c. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah tenaga kerja

yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Selanjutnya berdasarkan penyebab terjadinya menurut (Arsyad, 2004 : 19), pengangguran dikelompokkan menjadi 9 macam:

- a. Pengangguran friksional (*frictional unemployment*) adalah pengangguran karena pekerja menunggu pekerjaan yang lebih baik.
- b. Pengangguran struktural (*Structural unemployment*) adalah pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja.
- c. Pengangguran teknologi (*Technology unemployment*) adalah pengangguran yang disebabkan perkembangan/pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan.
- d. Pengangguran kinkikal adalah pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Contoh penyebabnya, karena adanya perusahaan lain sejenis yang beroperasi atau daya beli produk oleh masyarakat menurun.
- e. Pengangguran musiman adalah pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Umumnya pada bidang pertanian dan perikanan. Contohnya adalah para petani dan nelayan.
- f. Pengangguran setengah menganggur adalah pengangguran di saat pekerja yang hanya bekerja di bawah jam normal (sekitar 7-8 jam per hari).
- g. Pengangguran keahlian adalah pengangguran yang disebabkan karena tidak adanya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang keahlian. Pengangguran jenis ini disebut juga pengangguran tidak kentara dikarenakan mempunyai aktivitas berdasarkan keahliannya tetapi tidak menerima uang. Contohnya adalah anak sekolah (siswa) atau mahasiswa. Mereka adalah ahli pencari ilmu, tetapi mereka tidak menghasilkan uang dan justru harus mengeluarkan uang atau biaya,

misalnya harus membeli paket buku LKS atau membayar biaya kursus yang diselenggarakan oleh sekolahnya sendiri. Contoh lainnya adalah (misalnya) seorang pelatih pencak silat yang tidak meminta gaji dari organisasinya. Pengangguran tidak kentara ini, juga bisa disebut sebagai pengangguran terselubung.

- h. Pengangguran total adalah pengangguran yang benar-benar tidak mendapat pekerjaan, karena tidak adanya lapangan kerja atau tidak adanya peluang untuk menciptakan lapangan kerja.
- i. Pengangguran unik adalah pekerja yang menerima gaji secara rutin tanpa pemotongan, tetapi di tempat kerjanya hanya sering diisi dengan bercerita sesama pekerja karena minimnya pekerjaan yang harus dikerjakan. Hal ini disebabkan karena tempat kerjanya kelebihan tenaga kerja. Pengecualian untuk pegawai atau petugas pemadam kebakaran atau penanggulangan bencana alam. Pegawai atau petugas seperti demikian tenaganya harus disimpan dan dipersiapkan secara khusus jika ada pelatihan atau

simulasi atau harus diterjunkan pada situasi sebenarnya.

2.1.2. Penyebab Dan Dampak Pengangguran

Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain:

- a. Penduduk yang relatif banyak.
- b. Pendidikan dan keterampilan yang rendah.
- c. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja.
- d. Teknologi yang semakin modern.
- e. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan.

Pengangguran bisa menimbulkan dampak negatif, yang bukan hanya bagi sang penganggur, namun juga bagi masyarakat di sekitarnya. Pengangguran membawa permasalahan ekonomi suatu keluarga, yang bisa menyebabkan terganggunya kondisi psikis seseorang.

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Perkembangan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan prestasi kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil padatahun sebelumnya (Todaro, 2006 : 23).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonominya atau tidak. (Suryana, 2005 : 15).

Menurut Rostow, (2004 : 4) bahwa pertumbuhan perekonomian terbagi kedalam tiga sektor pertumbuhan antara lain :

1. Sektor pertumbuhan primer, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang menciptakan kekuatan ekspansi (perluasan) berbagai sektor lain dalam perekonomian.
2. Sektor pertumbuhan supplemeniter yaitu sektor yang berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari perkembangan di sektor kebutuhan primer.

3. Sektor pertumbuhan tersier yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang berkembang selama kenaikan pendapatan penduduk dan produksi sektor pertanian.

Berdasarkan pengertian di atas, jelas terlihat bahwa pertumbuhan sektor primer merupakan sektor pemimpin (*leading sector*), karena semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dihasilkan sektor ini menimbulkan ekonomi eksteren yang besar sekali misalnya dari sektor tersebut membawa dampak yang luas bagi sektor lainnya seperti sektor migas yang memberikan pengaruh yang besar terhadap sub sektor transportasi dan industri pipa logam.

Selanjutnya Sukirno (2001 : 181) juga menyatakan bahwa : “Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang penekanannya dalam tiga aspek yaitu proses, output perkapita dalam jangka panjang”.

Dengan demikian dapat dilihat secara jelas bahwa kelemahan-kelemahan yang ada di negara-negara yang sedang berkembang adalah karena adanya kekurangan modal dan skill. Untuk mengantisipasi hal tersebut umumnya dilakukan berbagai jalan

seperti dengan mengadakan pinjaman dan mendatangkan tenaga ahli dari negara-negara lain yang lebih maju.

Pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena hal ini dapat menjadi gambaran bagi perbaikan dan pertumbuhan ekonomi. Parameter tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan pertama bagi pemerintah dalam usaha menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih terarah, terencana, terpadu dan berkesinambungan.

2.3. Teori Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama terus-menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu-waktu sebelumnya dan berlaku di mana-mana dan dalam rentang waktu yang cukup lama.

Menurut Nasution (2002 :20) inflasi juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai mata uang suatu negara. Jadi inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara

tajam yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Seiring dengan kenaikan harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut.

Selanjutnya menurut Nasution (2002 : 24) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat permintaan barang dan jasa yang meningkat namun persediaan barang dan jasa terbatas.
- b. Kenaikan harga bahan dan biaya produksi.
- c. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja.
- d. Kenaikan harga barang impor.
- e. Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru.
- f. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. akibatnya angka inflasi mencapai 70%.
- g. Uang yang beredar terlalu banyak.
- h. Perang.

Menurut Nopirin (2008 : 28) Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan :

- a. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)

- b. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
- c. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
- d. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Selanjutnya menurut Sukirno, (2005 : 36) inflasi Berdasarkan jenisnya yaitu :

- a. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran ini akan menimbulkan inflasi.

- b. Inflasi desakan biaya

Inflasi ini juga berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerjaan baru dengan

tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

2.4. Teori Pertumbuhan Penduduk

Permintaan dan penawaran tenaga kerja merupakan jumlah usaha atau jasa kerja yang tersedia dalam masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam definisi mengandung pengertian jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Jumlah dan kualitas tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah penduduk, struktur umur, tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat penghasilan, pendidikan, produktifitas, dan sebagainya.

Masing-masing faktor tersebut dapat saling mempengaruhi serta secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi penyediaan tenaga kerja :

1. Laju pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi partisipasi angkatan kerja. Sebagai akibat dari tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang

rendah, maka penduduk makin menjadi tua. Dengan adanya perluasan program dan kenaikan tingkat pendidikan, mengakibatkan turunnya tingkat partisipasi dan selanjutnya akan mengurangi penyediaan tenaga kerja.

2. Dilihat dari struktur umur penduduk, penduduk usia muda mempunyai dua konsekuensi ekonomi. Pertama, beban tanggungan menjadi lebih besar. Kedua, jumlah pendatang baru yang memasuki pasar tenaga kerja akan menjadi lebih besar. Dengan demikian akan memperbesar *supply* tenaga kerja pada pasar tenaga kerja.
3. Kualitas pekerjaan yang dibutuhkan cenderung semakin meningkat akibat dari adanya perluasan fasilitas-fasilitas pendidikan. Sebabnya adalah karena orang-orang yang berpendidikan yang memasuki pasar tenaga kerja mengharapkan pekerjaan yang sama dengan para pekerja berpendidikan sebelumnya. Disisi lain faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan tenaga kerja akan sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan kesempatan kerja. Sedangkan laju pertumbuhan kesempatan kerja itu

sendiri sangat tergantung pada laju pertumbuhan output dan perubahan rata-rata tenaga kerja.

2.5. Hubungan Pertumbuhan ekonomi Terhadap Jumlah Pengangguran

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

Penelitian lain yang menyatakan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan

kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran.

2.6. Hubungan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran

Efek pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran dari pasar tenaga kerja, menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk mempunyai implikasi yang penting bagi kesempatan kerja. Menurut Ghofari (2010 : 16), pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa disertai dengan proporsi investasi yang lebih besar, mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan, meningkatnya pengangguran dan menghalangi transformasi struktural dalam angkatan kerja.

Permintaan dan penawaran tenaga kerja merupakan jumlah usaha atau jasa kerja yang tersedia dalam masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam definisi mengandung pengertian jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Jumlah dan kualitas tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah penduduk, struktur umur, tenaga kerja atau

penduduk dalam usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat penghasilan, pendidikan, produktifitas, dan sebagainya.

2.7. Hubungan Tingkat Inflasi Terhadap Jumlah Pengangguran

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno, 2006).

Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran kedudukannya naik (tidak ada *trade off*) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva philips dimana terjadi *trade off* antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah.

(Nopirin, 2000 : 21). Pada awalnya, kurva Phillips memberikan gambaran kasar mengenai kausalitas proses inflasi. Rendahnya tingkat pengangguran dianggap memiliki keterkaitan dengan ketatnya pasar tenaga kerja dan tingginya tingkat pendapatan dan permintaan dari konsumen. Kurva Phillips juga memberikan gagasan mengenai pilihan (*trade off*) antara pengangguran dan inflasi.

Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat

pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah (Dernburg dan Karyaman Muchtar, 2002).

2.8. Hubungan Besaran Upah Dengan Jumlah Pengangguran

Selanjutnya menurut Samuelson (2007: 14), menyatakan bahwa: “Peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih

tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli. Pada suatu tingkat upah tertentu, kurva penawaran tenaga kerja akan berlekuk kebelakang (*backward bending curve*)”.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Subjek dan Objek.

Subjek dari penelitian ini adalah Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah data-data mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Kota Banda Aceh, dimana data yang diperoleh selama tahun 2006 – 2015.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif yang merupakan data sekunder, yang dilakukan melalui pengujian teori-teori dan melalui penelitian lapangan, dimana metode deskriptif juga adalah untuk menganalisa data dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan data sehingga dapat

memberikan suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik :

- a. *Library research* (penelitian kepustakaan),
- b. *Field research* (penelitian lapangan):
 - *Wawancara*, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait sebagai objek penelitian.
 - *Observasi*, terhadap sejumlah data yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Kota Banda Aceh.

3.4. Teknik Analisa Data

Selanjutnya data sekunder maupun data primer yang telah diperoleh dari penelitian, dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut bidangnya masing-masing selanjutnya disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dalam hal ini menjelaskan mengenai Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Kota Banda Aceh.

IV. KESIMPULAN

1. Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah daerah dataran rendah dengan luas wilayahnya \pm 130 Km² (13.000 Ha) yang fungsi tanahnya sebahagian besar merupakan lokasi pemukiman penduduk dan pertokoan.
2. Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk tahun 2004 sebanyak 287.534 jiwa, pada awalnya berstatus Kotamadya yang terdiri dari 4 Kecamatan, 35 Kelurahan dan 13 Desa. Sejalan dengan dilakukannya perubahan status Kotamadya menjadi Kota sebagai bentuk penyesuaian dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka jumlah pemerintahan kecamatan di Kota Banda Aceh terjadi pemekaran hingga jumlahnya mencapai sebanyak 9 Kecamatan.
3. Perkembangan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh dari tahun 2006 sampai 2015 mengalami peningkatan terus menerus dan mencapai puncak pada tahun 2010 yaitu 17,05% dengan

peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya dimana tahun 2009 tingkat pengangguran hanya berkisar 7,70 %.

4. Peningkatan tingkat pengangguran yang drastis pada tahun 2010 disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan harga Bahan Baku Minyak. Harga Bahan Baku Minyak merupakan salah satu unsur bahan pokok yang mempengaruhi aspek kehidupan sehingga kenaikan bahan baku minyak ini mendorong kenaikan biaya produksi bagi perusahaan yang berujung pada kenaikan harga barang di pasar. Tingkat Pengangguran pada tahun 2010 sampai 2015 mengalami penurunan secara terus menerus dengan penurunan hampir mencapai 10% pada tahun 2015, dimana pada tahun 2010 tingkat pengangguran sebesar 17,05% kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi 8,37%.
5. Pemerintah Daerah melakukan kebijakan – kebijakan lainnya seperti Mengembangkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil

dan Menengah (UKM), melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan–kawasan, membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri, Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan di dalam Wilayah Kota Banda Aceh, Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan, memperlambat laju pertumbuhan penduduk (memini-malisirkan menikah pada usia dini), dan mengembangkan potensi kelautan dan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2004, *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Balwin, 2002, *Salesmanship Suatu Ilmu dan Seni*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Dernburg dan Karyaman Muchtar, 2002, *Macro Economic*, Terjemahan Sihotang, Bharata Indonesia, Jakarta.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 2000, *Indonesia Dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Depan*, LP3ES, Jakarta.
- Ghofari, 2010, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Gilarso, 2003, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali, Jakarta.
- J. Simanajuntak, Payaman. 2001. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kaufman dan Hotckiss, 2009, *Regional Development In Indonesia : Patern and Issue*, Economic Bulletin, Australian University.
- Komaruddin, 2004, *Persoalan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Nasution, Mulia, 2002. *Manajemen Transportasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nopirin, 2000, *Ekonomi Moneter*. Buku I. BPFE: Yogyakarta.
-, 2008, *Ekonomi Moneter*. Buku II. BPFE: Yogyakarta.
- Rostow, 2004, *Perancangan Strategi Pemasaran*, Bina Aksara, Jakarta.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, 2007: *Makro Ekonomi*, Edisi Keempatbelas, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Siswanto, Sutojo, 2001, *Kerangka Dasar Manajemen Pemasaran*, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, Jakarta.
- Soeroto, 2010, *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sukirno, Sadono, 2000, *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Pustaka.
-, 2001, *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Pustaka.
-, 2005, *Pengantar Teori*

- Ekonomi Makro, Bina Graha, Jakarta.
-, 2006, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Surachman, 2002, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, 2005, Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan. Penerbit Salemba Empat Edisi Pertama.
- Susanti, Hera, 2005, Indikator-Indikator Makroekonomi, Jakarta, PEM-FE-UI.
- Todaro, Michael, 2006, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan.
- Tulus, Tambunan, H., 2001, Perekonomian Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Winardi, 2010, Ekonomi Pembangunan, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- BPS, 2008, berbagai publikasi angkatan kerja dan data inflasi. Diakses dari <http://Aceh.bps.go.id> diakses pada tanggal 30 April 2008.
- Disnakertrans Propinsi Aceh, 2004, Program Kegiatan penanganan Pengangguran Disnakertrans Aceh.